

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil uraian penelitian dan analisa yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada yaitu :

1. Persetujuan Bangunan Gedung Kabupaten Sleman Pra dan Pasca adanya Undang-Undang Cipta kerja adalah terdapat perbedaan regulasi dimana sebelum adanya Undang-Undang Cipta kerja berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011, sedangkan saat diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 yang mencabut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011.

Perbedaan yang kedua adalah terdapat perbedaan Nomenklatur dimana sebelumnya menggunakan Izin Mendirikan Bangunan, setelah adanya Undang-undang Cipta Kerja menggunakan Nomenklatur Persetujuan Bangunan Gedung.

Perbedaan yang ketiga adalah, dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 terdapat penambahan asas baru yaitu kearifan local yang bermaksud untuk Kearifan local dalam Perda Nomor 14 Tahun 2021 tersebut memiliki tujuan untuk memelihara dan melindungi nilai budaya yang ada di Kabupaten Sleman

Perbedaan yang keempat adalah terkait klasifikasi Bangunan Gedung, dimana pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 menghapus klasifikasi zona gempa. Selain itu tingkat permanensi juga dirubah dari permanen, semi

permanen, dan sementara menjadi permanen dan non permanen saja. Selanjutnya terkait kepemilikan bangunan Gedung dalam Perda Nomor 5 Tahun 2011 kepemilikan meliputi Pemerintah Pusat, Perorangan, dan Badan Usaha dirubah menjadi kepemilikan milik negara dan selain milik negara.

Perbedaan yang kelima adalah penambahan ruang lingkup SIMBG dimana Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 dalam pengajuan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung menggunakan system aplikasi SIMBG.

Perbedaan yang keenam terkait persyaratan teknis, Peraturan Bupati Sleman Nomor Sleman Nomor 49 Tahun 2012 mengatur terkait persyaratan dalam Perizinan Bangunan Gedung. Pasal 70 ayat (1) mengatur bahwa Pemohon mengajukan permohonan IMB secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan kepada Kepala Dinas melalui Kantor Pelayanan Perizinan. Aturan terkait PBG dalam Perbup Nomor 41.3 Tahun 2021 ditambah dengan adanya konsultasi perencanaan sesuai dengan pasal pasal 2 ayat (5). Konsultasi perencanaan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap dokumen rencana teknis. Terdapat perubahan terkait Dokumen rencana teknis dalam persetujuan bangunan Gedung yaitu ditambahkan persyaratan dokumen rencana teknis

2. Kendala yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja adalah Kendala yang dialami Kabupaten Sleman setelah adanya Undang-undang Cipta Kerja dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kendala Internal dan Eksternal, kendala internal berasal dari aplikasi permohonan PBG yaitu melewati SIMBG dan Kendala Eksternalnya adalah dari Pemohon itu sendiri.

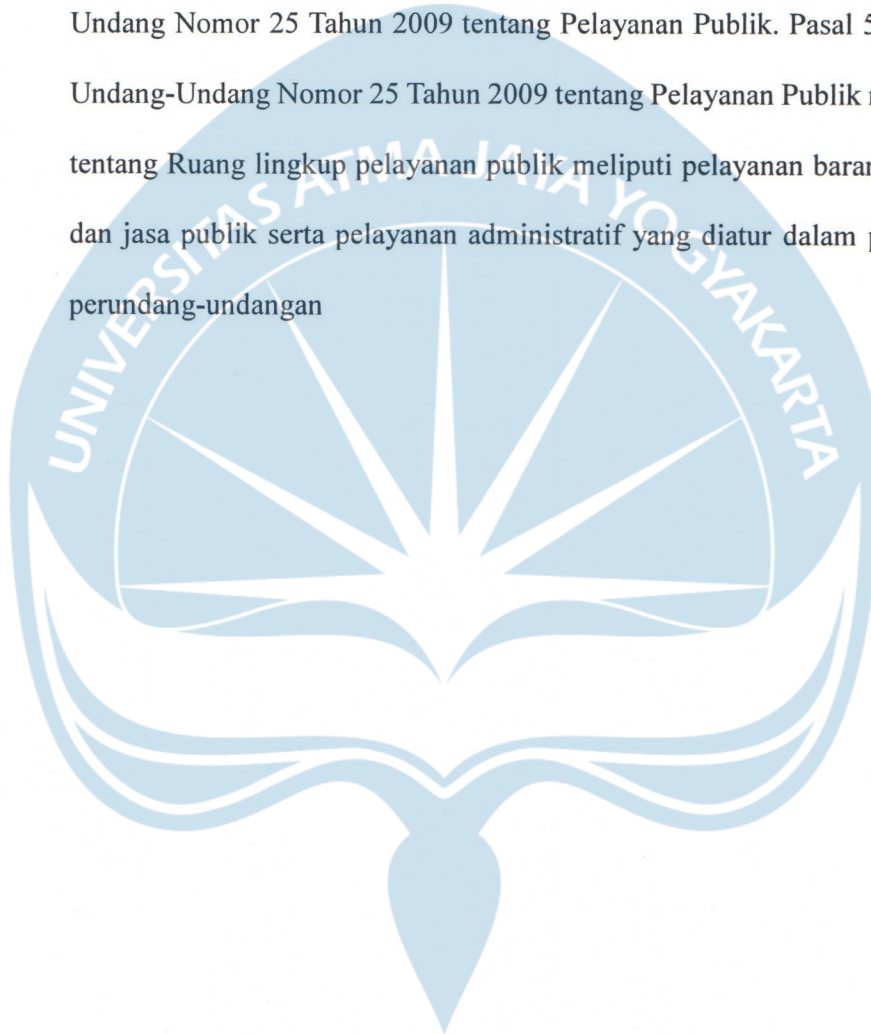
3. Solusi dari Pemerintah Kabupaten Sleman adalah Bersurat Secara Resmi dengan Kementerian PUPR, Berkomunikasi secara Intens melalui Whatsapp, dan Selalu merespon complain dari masyarakat

#### **B. Saran**

Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengatasi permasalahan kendala internal, harus berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian PUPR dengan cara berkomunikasi secara intens setiap kendala-kendala yang dihadapi berkaitan dengan permasalahan aplikasi SIMBG. Pemerintah Kabupaten Sleman juga harus berkontribusi memberikan masukan-masukan untuk kepentingan pemutakhiran web aplikasi SIMBG sehingga aplikasi tersebut dapat dimaksimalkan tanpa kendala
2. Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengatasi permasalahan kendala eksternal, harus sering bersosialisasi terkait penggunaan SIMBG, persyaratan persyaratan yang harus terpenuhi sehingga Kendal-kendala yang dialami oleh masyarakat dalam pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung dapat dihindari. Aturan terkait Persetujuan bangunan Gedung mengalami perubahan dimana terdapat perbedaan cara pengajuan dan tahapan pengajuan, sehingga diperlukan pergerakan yang aktif yang harus dilakukan dengan cara sosialisasi oleh dinas PUPKP sebagai dinas teknis dengan DPMPPTSP sebagai dinas perizinan yang mengeluarkan Persetujuan

Bangunan Gedung. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerahnya sudah sewajibnya untuk melaksanakan sosialisasi sebagai wujud dari salah satu Pelayanan Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur tentang Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Mukthie Fadjar, 2016, *Sejarah Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Malang: Setara Press
- Adrian Sutedi, 2019, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Edisi 1 Cet 1*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ateng Syafrudin, 1991, *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II dan pembangunannya*, Jakarta: Rineka Cipta
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, 2015, *Undang-Undang Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Mahardika
- Juniarso Ridwan, Achmad Sodik, 2009, "*Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*", Bandung: Nuansa
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2013, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Bandung: Nuansa.
- Kementerian Keuangan, *Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung*
- La Ode Bariun dan Hijriani, 2021, *Masa Depan Otonomi Daerah Terhadap Keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja (Resentralisasi ataukah Desentralisasi), Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*.
- Lexy J. Moloeng, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Marohajan Panjaitan, 2022, *Kemanfaatan Hukum, Kemudahan Berusaha, Membangun Investasi dan Perekonomian di Indonesia*, Bandung: Penerbit Reka Cipta.
- Mokhammad Najih, 2014, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Malang: Setara Press
- Riawan Tjandra, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atmajaya Yogyakarta
- Ridwan, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*", FH UII Press
- Rio Cristiawan, 2022, *Omnibus Law dan Penerapannya*, Jakarta: Sinar Grafika,

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1991

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, "*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta

Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum (Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya)*., ELSAM, Jakarta

## JURNAL

Anastasia Dhea Widyastuti, 2023, *Analisis Yuridis Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*", *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol 2 No 1

Endang Pratiwi, "*Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum,*" *Jurnal Konstitusi* 19273–27, no. 19, 2022

Erwin Boni, Moh Saleh 2023, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*, *Jurnal Hukum* Vol 20, No 2.

Inggal Ayu, Ristina, "*Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa*" *SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2023

Ratih Dita Rohalia, Nur Laela Meilani, 2023 *Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Bukittinggi*, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, halaman 4518.

Roman Situngkir, 2021, *Peralihan Izin Mendirikan Bangunan Menjadi Persetujuan Bangunan Gedung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, *Jurnal Kajian Hukum* Vol. 2 No. 3, halaman. 664-672

Seli Yuniar, 2023, *Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (Simbg) Terhadap Kualitas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (Pbg) Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir, Palembang*

Wicipto Setiadi, 2020, *Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law*, Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 1, April 2020

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Bupati Sleman Nomor 41.3 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung.

## **TESIS**

Baleke, 2024 Thesis, Analisis Tingkat Kinerja Dinas Teknis Dalam Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (Pbg) Pada Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Banjarbaru, Universitas Lambung Mangkurat.

Irman Murafer, 2012, Thesis, Efektivitas Implementasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kota Manokwari

Junaidi, 2021, Tesis, Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Merauke

Kasman Siburian, 2008, Tesis, Implementasi Pengawasan Pemerintah Kota Medan Terhadap Izin Mendirikan Bangunan, Universitas Sumatera Utara

T Jannatun Nisak, 2020, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru, Pelaksanaan Perizinan Mendirikan

Bangunan Dan Kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Kampar

**INTERNET**

- Admin, Teori Negara Hukum, [https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-negara-hukum/#\\_ftnref2](https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-negara-hukum/#_ftnref2) diakses pada tanggal 22 Oktober 2023.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, asasi, in *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asasi> diakses tanggal 10 Maret 2024
- Diana Kusumastuti Dkk, Buku Panduan SIMBG, Direktur Bina Penataan Bangunan, <https://simbg.pu.go.id/info/Tutorial-Pemohon-SIMBG-PBG-SLF-Baru.pdf> diakses tgl 10 maret 2024
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman, forum Penyelesaian Pemecahan Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha <https://dpmpstps.slemankab.go.id/2024/03/07/forum-penyelesaian-pemecahan-permasalahan-dan-hambatan-yang-dihadapi-pelaku-usaha/> diakses pada Tanggal 5 april 2024
- Ika Warakasih, Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Sebagai Salah Satu Instrumen Pengendali Pemanfaatan Ruang, <https://bappeda.jogjaprov.go.id/artikel/detail/73-izin-mendirikan-bangunan-imb-sebagai-salah-satu-instrumen-pengendali-pemanfaatan-ruang> diakses tanggal 12 maret 2024
- <https://jdih.slemankab.go.id/>
- Kecamatan Semarang Timur, “Rekomendasi dan Perizinan IMB”, [https://kecsmgmtimur.semarangkota.go.id/rekomendasidanperijinanimb#:~:text=Arti%20atau%20pengertian%20IMB%20\(Izin,mengurangi%20luas%20C%20ataupun%20merenovasi%20suatu](https://kecsmgmtimur.semarangkota.go.id/rekomendasidanperijinanimb#:~:text=Arti%20atau%20pengertian%20IMB%20(Izin,mengurangi%20luas%20C%20ataupun%20merenovasi%20suatu) diakses tanggal 29 Juli 2024
- Michele Natalia, “Pemerintah menghapus status Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).” <https://www.idxchannel.com/economics/catat-imb-berubah-menjadi-pbg-simak-perbedaannya-ini> diakses tanggal 20 Okt 2023.
- Pandangan Jogja, GKR Mangkubumi Larang Pembangunan Basement di Seluruh DIY, Apa Alasannya? <https://kumparan.com/pandangan-jogja/gkr-mangkubumi-larang-pembangunan-basement-di-seluruh-diy-apa-alasannya-lz3SDwLH2jq/3> diakses tanggal 29 Juli 2024



Ratih, Pengertian Asas Hukum dan Berbagai Macam Asasnya!, Gramedia Blog, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-asas-hukum/> diakses tanggal 10 maret 2024.

Rio Christiawan, Paradigma Baru Mendirikan Bangunan, <https://www.hukumonline.com/berita/a/paradigma-baru-mendirikan-bangunan-lt60504d94ca81d/> diakses tanggal 29 februari 2024

